

# **PEMERINTAH KABUPATEN BONE**



## **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BONE**

**TAHUN  
2018 - 2023**





**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. **Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. **Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah** adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. **Peraturan Kepala Daerah** yang selanjutnya disebut **Perkada** adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. **Pembangunan daerah** adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. **Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. **Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah** suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA PENULISAN**  
**Pasal 5**

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- Lampiran I : Dinas Pendidikan
- Lampiran II : Dinas Kesehatan
- Lampiran III : BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
- Lampiran IV : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Lampiran V : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Lampiran VI : Satuan Polisi Pamong Praja
- Lampiran VII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Lampiran VIII : Dinas Pemadam Kebakaran
- Lampiran IX : Dinas Sosial
- Lampiran X : Dinas Ketenagakerjaan
- Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan
- Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup
- Lampiran XIV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Lampiran XIV : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lampiran XVII : Dinas Pengendalian Penduduk dan



	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 9**

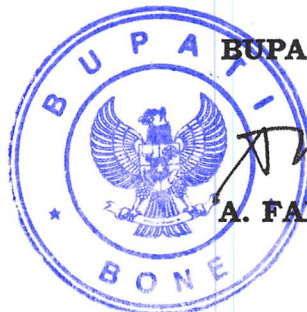
Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019



**BUPATI BONE,**

*[Signature]*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

*[Signature]*  
**A.SURYA DARMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019



**BUPATI BONE,**

*[Signature]*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 16 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

*[Signature]*  
**A.SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bone, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan merupakan acuan dan pedoman penyusunan Anggaran BPKAD.

Renstra BPKAD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan kinerja BPKAD tahun 2013-2018 serta rencana estimasi program dan kegiatan tahun 2018-2023. Disusunnya Renstra BPKAD tahun 2018-2023 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Bone dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Renstra BPKAD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Watampone, 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BONE

**Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19650915 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang ..... 1
1.2.	Landasan Hukum ..... 2
1.3.	Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4.	Sistematika Penulisan ..... 5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 6
2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 11
2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 14
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkata Daerah ..... 41
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... 44
3.2	Tealaah Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 48
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi ..... 49
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 54
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis..... 55
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Pelayanan PD 56
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ... 69
BAB VIII	PENUTUP ..... 71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah sarana dan prasarana BPKAD. . . . .	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 BPKAD. . . . .	15
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018. . . . .	22
Tabel 2.4	Target dan Realisasi PAD Tahun 2018. . . . .	38
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan PD . . . . .	57
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran strategis dan kebijakan. . . . .	58
Tabel 6.1	Rencana Progran, kegiatan dan pendanaan BPKAD . . . . .	61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. . . . .	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

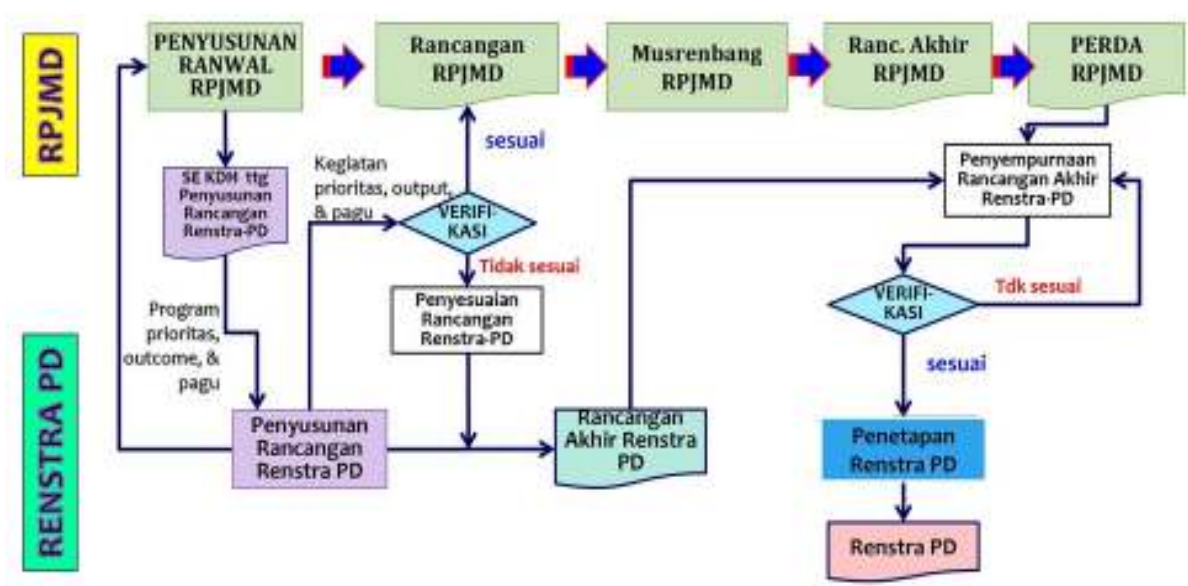
### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Renstra OPD memuat antara lain tentang kedudukan dari setiap OPD, program/kegiatan apa yang secara garis besar direncanakan serta cara untuk mencapai tujuan itu. Oleh karenanya, Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Kepala Daerah. Dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan strategik disebut 'Rencana Strategis' (Renstra).

Setiap OPD dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 adalah Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Bone merupakan pedoman penyusunan seluruh Renstra PD di lingkungan Pemda Kabupaten Bone, merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana strategis BPKAD Kabupaten Bone mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 1 poin 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode lima tahun yang menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. Sesuai pasal 108 permendagri 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan oleh kepala daerah yang dilaksanakan beriringan dengan penyusunan RPJMD.



Keterkaitan Renstra BPKAD dengan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dilakukan setelah BPKD menerima Surat Edaran Bupati Bone perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD adalah:

1. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah BPKAD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD;
2. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
3. Perumusan indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023; dan
4. Hasil evaluasi terhadap Renstra BPKAD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra BPKAD periode 2018 - 2023.

1.2 Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mengacu pada:

1. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan fungsi penunjang urusan pemerintahan terkait keuangan selama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2023 yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam mencapai maksud diatas, tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan BPKAD selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis BPKAD selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target pembangunan BPKAD selama 5 (lima) tahun mendatang.

- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi BPKAD selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.
- g. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.
- h. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Renstra BPKAD periode sebelumnya

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaah Visi, Misi dan, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menelaah Renstra K/L dan Rencana RTRW/KLHS untuk menentukan isu-isu strategis

Bab IV Tujuan Dan Sasaran Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Bone beserta indikatornya

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan Bab ini menjelaskan relevansi dan korelasi antara visi misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Bone

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Bab ini menjelaskan program dan kegiatan beserta pendanaannya yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Bone

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Seiring dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tidak banyak perubahan yang mendasar setelah adanya pembentukan OPD baru hanya ada perubahan nomenklatur bidang dan sub bidang. BPKAD Kabupaten Bone adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan daerah, belanja daerah, serta aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPKAD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah

##### **1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Tugas Pokok Kepala BPKAD Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi:

- a. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Memimpin pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Memimpin pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan badan;

- e. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah;
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. Memvalidasi rencana dan program kerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Sekretaris**

Tugas pokok Sekretaris adalah menyelenggarakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. Pembinaan urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/Kekayaan Negara;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Kepala Bidang Anggaran**

Tugas Pokok Kepala Bidang Anggaran adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- b. Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dan APBD-P;
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

## **4. Kepala Bidang Aset**

Tugas Pokok Kepala Bidang Aset adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang aset yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi:



- a. Perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. Pelaksanaan kordinasi penata usahaan, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan/pemeliharaan, pemindatangan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Perbendaharaan**

Tugas pokok bidang perbendaharaan adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang perbendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, pembinaan kebendaharaan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- b. Pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat Perintah Membayar dari SKPD;
- c. Pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. Pelaksanaan sistim penggajian, pelaporan data PNS yang efektif dan efisien;
- e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Kepala Bidang Akuntansi**

Tugas Pokok Kepala Bidang Akuntansi adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang akuntansi, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah pada SKPD;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan bintek akuntansi pemerintah serta regulasi keuangan lainnya;
- d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

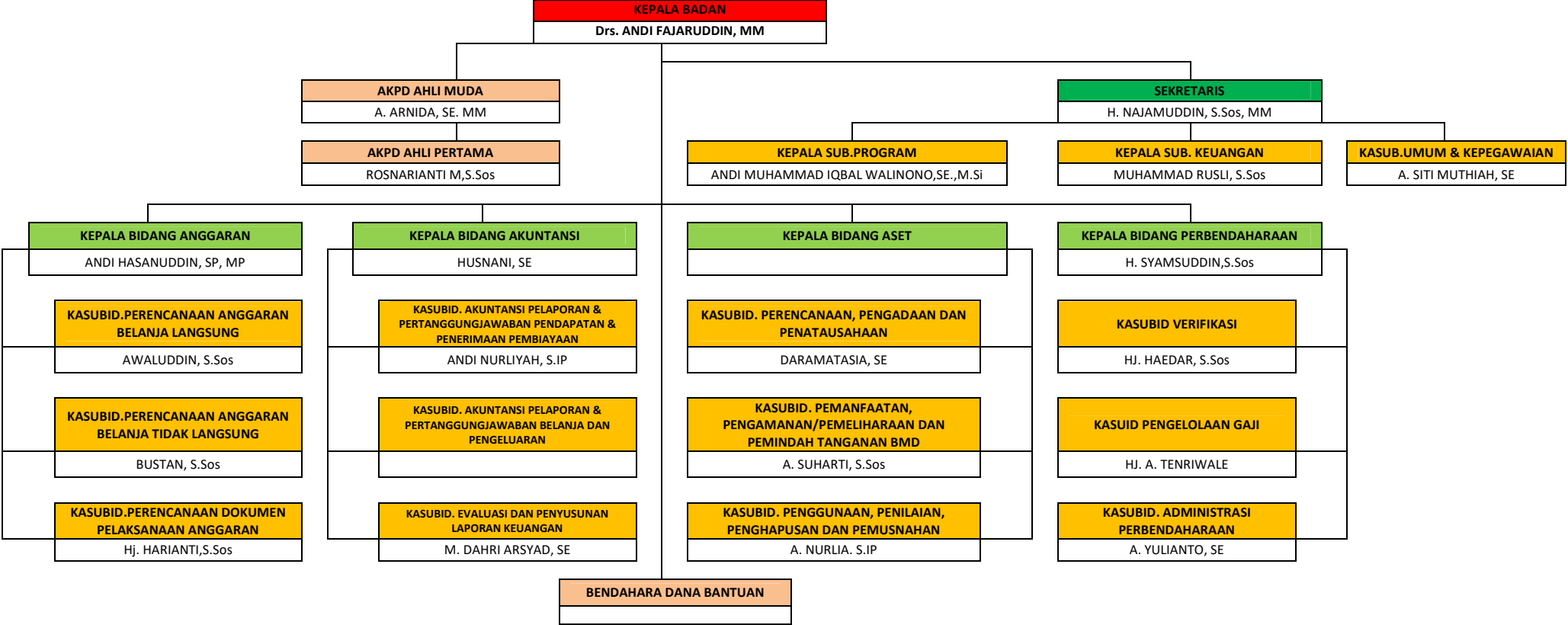


- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sejak berdiri untuk pertamakalinya berbentuk Badan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan mengalami penyempurnaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mengalami perubahan lagi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Anggaran
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung
  - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
  - c. Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4. Bidang Akuntansi
  - a. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
  - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
  - c. Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
5. Bidang Aset
  - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penata Usahaan
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/Pemeliharaan dan Pemindah Tangan Barang Milik Daerah
  - c. Sub Bidang Penggunaan, Penilaian, Penghapusan dan Pemusnahan.
6. Bidang Perbendaharaan
  - a. Sub Bidang Administrasi Pembendaharaan
  - b. Sub Bidang Pengelolaan gaji
  - c. Sub Bidang Verifikasi.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah



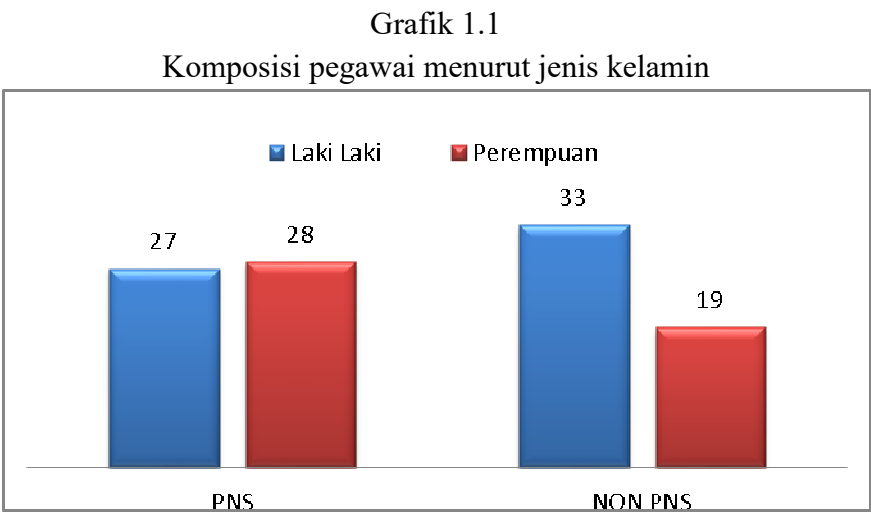
Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bone didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 55 orang (kondisi awal Tahun 2018). Sebagai OPD yang mengelola kewenangan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi di bidangnya, tercermin dari persentase pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1 dan S2) sebesar 71.03 % (76 orang) dari total Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bone.

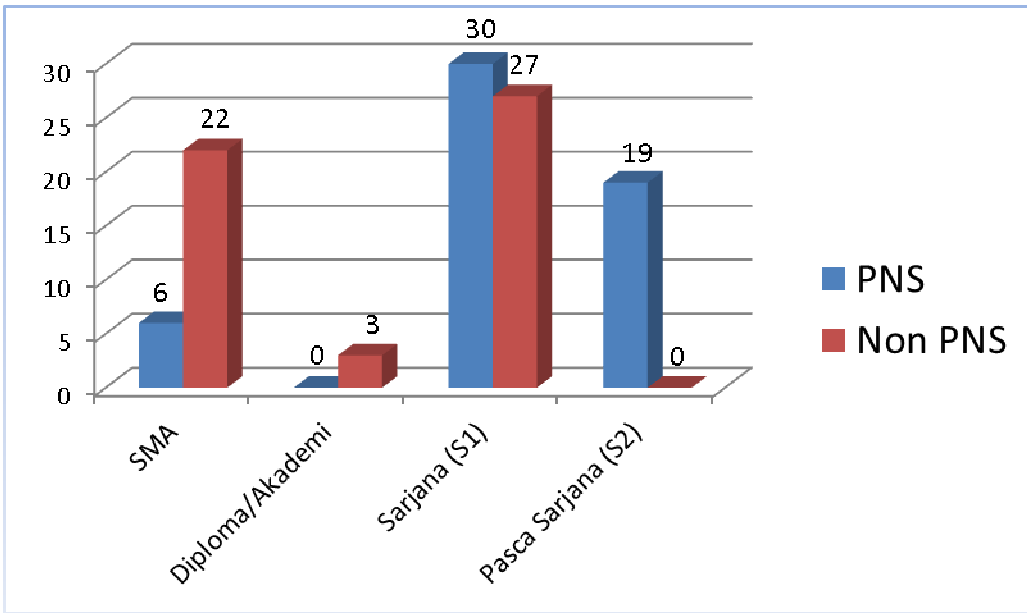
Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi personil yang mengisi jabatan structural, jabatan fungsional tertentu dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai BPKAD adalah 107 pegawai terdiri dari 55 PNS dan 52 Non PNS. Dilihat dari jenis kelamin pegawai BPKAD 60 pegawai laki-laki dan 47 perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

Jika dilihat berdasarkan pendidikan sebagian besar pegawai BPKAD adalah sarjana S-1 yaitu sebanyak 53.27 %, S-2 sebanyak 17.76 %, lulusan SLTA sebanyak 26.17 %, Diploma 2.80 % lainnya lulusan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

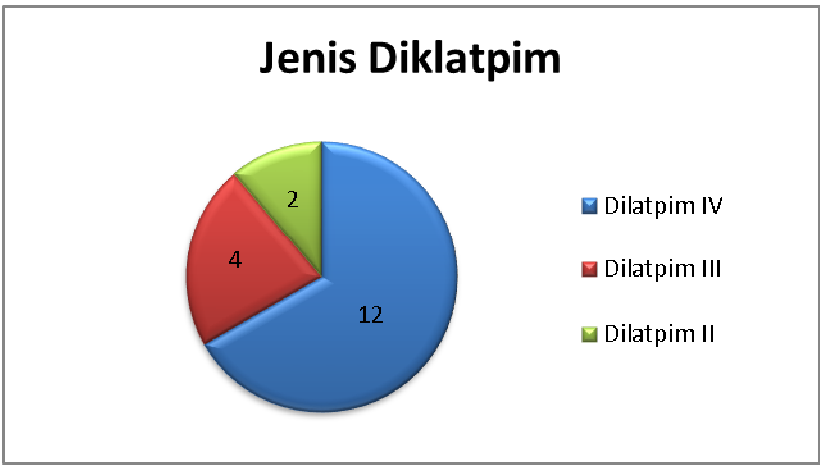
Grafik 1.2  
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Pendidikan



Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

Secara berkala pegawai BPKAD mengikuti diklat struktural. Hingga tahun 2018, jumlah yang mengikuti diklatpim sebanyak 18 pegawai, yaitu diklatpim II, III dan IV sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

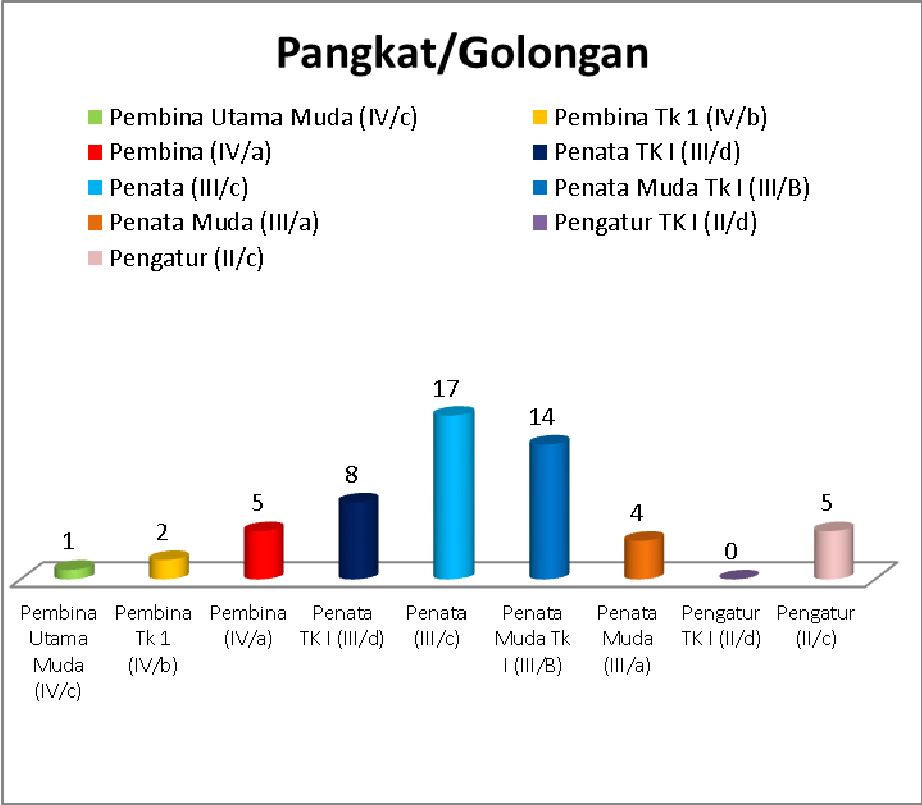
Grafik 1.3  
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural



Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan ruang terbanyak adalah golongan III/c yaitu sebanyak 15.89 %, lainnya merata sebagaimana teruang dalam grafik 4 berikut :

Grafik 1.4  
Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang



Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik berupa kantor maupun sarana lainnya mutlak harus disediakan meskipun belum optimal. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah sarana dan prasarana BPKAD

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11 ruangan	1 Ruang Kadis
			2 Ruang Sekretaris
			3 Ruang Bidang Anggaran
			2 Ruang BidangPembendaharaan
			1 Ruang Bidang Asset
			2 Ruang Bidang Akuntansi
2	Kendaraan dinas		
	Roda Empat	10 buah	
	Roda Dua	37 buah	
3	Komputer	52 buah	
	Laptop	38 buah	
	PC	52 buah	
4	Mesin ketik	6 buah	
5	AC	19 buah	
6	TV	6 buah	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
7	Meja	104 buah	
8	Filling Kabinet	22 buah	
9	Kursi	185 buah	
10	Lemari	44 buah	
11	Printer	40 buah	
12	Kipas angin	3 buah	
13	Dispenser	3 buah	
14	Kamera Digital	4 buah	
15	Jam dinding	4 buah	
16	Kulkas	2 buah	
17	Handycam	1 buah	
18	Cermin	1 buah	
19	Scaner	3 buah	
20	Karpet	1 buah	
21	Brankas	5 buah	
22	Komputer Server	5 unit	

Sumber : Bidang Asset BPKAD 2019

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai sasaran/target kinerja yang didasarkan pada indikator utama sebagai berikut :

1. Tercapainya Opini WTP
2. Trend Kenaikan PAD 15% per tahun
3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Adapun pencapaian kinerja pelayanan BPKAD dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan indikator utama tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tercapainya Opini WTP				WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP (LKPD 2012)	WDP (LKPD 2013)	WDP (LKPD 2014)	WTP (LKPD 2015)	WTP (LKPD 2015)	100.00	100.00	-	100.00	100.00
2	Trend Kenaikan PAD 15% per tahun				10.00	15.00	30.00	45.00	75.00	39.04	66.32	67.26	70.94	81.30	390.42	442.13	224.18	157.65	108.40
3	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah				2,545,966, 438,114	2,545,966, 438,114	2,545,966, 438,114	2,545,966, 438,114	2,545,966, 438,114	2,545,966, 000,000	2,800,563, 364,291	3,051,047, 364,291	3,782,292, 923,562	3,596,186, 000,000	100.00	110.00	119.84	148.56	141.25
			Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	89%	90%	98%	100%	100%	88.90	90.30	97.80	100.00	100.00
			Jumlah surat		1,000	1,000	1,000			889	903	978			88.90	90.30	97.80	-	-
			Jumlah Rekening yang terbayar		344	333	338	338	349	320	333	338	338	349	93.02	100.00	100.00	100.00	100.00
			Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah ATK			1					1	-	-		-	100.00	-	-	-
			Cetak dan Penggandaan Dokumen			1					1	-	-		-	100.00	-	-	-
			Jumlah media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		50	50	58	95	53	50	40	58	95	53	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah Makan Minum Pegawai			1					1	-	-		-	100.00	-	-	-
			Jumlah PNS yang Menerima Gaji			10.803	11.70	10.891	96.17		10.803	11.70	10.891	96.17	-	100.00	100.00	100.00	100.00
			Daftar Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi luar daerah dan dalam daerah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah ATK bahan cetak dan penyediaan makan minum		1					1					100.00	-	-	-	-
			Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran				1	1	1			1	1	1	-	-	100.00	100.00	100.00
			Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasaran ASN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah bangunan gedung kantor		1					1					100.00	-	-	-	-
			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		8	7	3	4	3	8	7	3	4	3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas			4	7		1		4	7		1	-	100.00	100.00	-	100.00
			Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor		57	17	27	22	6	57	17	27	22	6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah dan jenis peralatan rumah dinas				4				0	4			-	-	100.00	-	-
			Terpeliharanya rumah dinas			1					1	-			-	100.00	-	-	-
			Jumlah peralatan gedung kantor		32	39	43	31	36		39	43	32	36	-	100.00	100.00	103.23	100.00
			Jumlah Kebutuhan Mebeleur				52	76	1		-	52	76	1	-	-	100.00	100.00	100.00
			Jumlah Mobil dan Motor yang dan dipelihara		3	17	19	36	36	3	17	19	36	36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah pemeliharaan gedung kantor		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah rumah dinas yang direhab				1	1			-	1	1		-	-	100.00	100.00	-
			fasilitas aset yang dipelihara			1	1				1	1			-	100.00	100.00	-	-
			<b>Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	-
			Jumlah dan jenis Pakaian dinas		71	118	118	120		71	118	118	120		100.00	100.00	100.00	100.00	-
			Pendidikan dan pelatihan aparatur					1					1		-	-	-	100.00	-
			<b>Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
			Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek		8	10	10	10	10	5	8		8	8	62.50	80.00	-	80.00	80.00
			Jumlah peserta sosialisasi		75	75	75	75	75	75	75	70	70	70	100.00	100.00	93.33	93.33	93.33
			Jumlah peserta Studi Banding						75					58	-	-	-	-	77.33
			<b>Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9					9	-	-	-	-	100.00
			Jumlah SKPD		67	68				67	68	-	-		100.00	100.00	-	-	-
			Jumlah eksampler per dokumen				45	45	45			45	45	45	-	-	100.00	100.00	100.00
			Jumlah desa rumah tangga sasaran					20	20				20	20	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah SKPD				23	65	65			23	65	65	-	-	100.00	100.00	100.00
			Jumlah Laporan SIMON TEPRa berbasis Online SKPD						66					66	-	-	-	-	100.00
			Presentase Penyediann Data Informasi				100%					100%			-	-	100.00	-	-
			Jumlah desa rumah tangga sasaran				20					20			-	-	100.00	-	-
			Persentase peningkatan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah SP2D yang diterbitkan		7440	7450	8000	7450	7450	7440	7450	8000	7450	7450	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah Peserta Bimtek			30					30	-	-		-	100.00	-	-	-
			Persentasi peningkatan promosi dan kerjasama investasi					100%	100%			100%	100%	100%	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah pelaksanaan pameran					1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Persentase Pelaksanaan Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan			100%	100%				100%	100%			-	100.00	100.00	-	-
			Jumlah Data kearsipan yang memadai			1					1				-	100.00	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan			1	1				1	1			-	100.00	100.00	-	-
			Persentasi pengembangan komunikasi informasi dan media massa				100%		100%			100%	100%	100%	-	-	100.00	-	100.00
			Jumlah berita/informasi yang ditayangkan				1		1			1	-	1	-	-	100.00	-	100.00
			Persentase penetaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Lahan yang diSertifikat		24	121	49	42	72	24	121	49	42	72	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			<b>Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
			Jumlah Buku standar harga			2	2	2	2		2	2	2	2	-	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah examplar Perda APBD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah examplar Perbup APBD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah examplar Perda APBD Perubahan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Jumlah examplar Perbub Penjabaran Perubahan APBD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah					1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah peserta sosialisasi					70	75				70	75	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah pelaksanaan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah					1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Peningkatan sumber pendapatan daerah					1					1		-	-	-	100.00	-
			Jumlah DPA dan DPPA SKPD					69	60				69	60	-	-	-	100.00	100.00
			Daftar Aset yang dimiliki					1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Tersedianya Laporan perkembangan pendapatan daerah					1					1		-	-	-	100.00	-
			Tersedianya PPAS dan Nota Keuangan APBD					1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Terpeliharanya SIMBA-BMD					1	1		-	-	1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah pelaksanaan pemeliharaan dan penghapusan aset					1	1				1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Pendataan Aset milik daerah					1			-		1		-	-	-	100.00	-
			Meningkatnya pengelolaan administrasi retribusi daerah					1			-	-	1		-	-	-	100.00	-

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa					1	1		-		1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah peserta Bimtek						70		-			70	-	-	-	-	100.00
			Jumlah faktur pajak					1	1		-		1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah exsampler Perda					1	1		-		1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah exsampler Perda					1	1		-		1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah SKPD yang dinilai					67	66		-	-	67	66	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlag examplar Perda BMD						1		-	-		1	-	-	-	-	100.00
			Jumlah peserta Studi Banding					75					55		-	-	-	73.33	-
			Jumlah aplikasi yang dipelihara					1	1		-	-	1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					1			-	-	1		-	-	-	100.00	-
			Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Data Kaearsipan Keuangan					1	1		-	-	1	1	-	-	-	100.00	100.00
			Jumlah SPM yang terbit						7000		-	-		689	-	-	-	-	9.84
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Daerah						1		-	-		1	-	-	-	-	100.00
			Jumlah pelaksanaan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah						1		-	-		1	-	-	-	-	100.00
			Jumlah Examplar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						1		-	-		1	-	-	-	-	100.00
			Jumlah Dokumen					1			-	-	1		-	-	-	100.00	-
			Jumlah laporan aset						25		-	-		25	-	-	-	-	100.00
			Jumlah Examplar Perda						1					1	-	-	-	-	100.00
			<b>Presentase Pelaksanaan Penyusunan Sistem Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					-			-	-	-	-	-
			Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah		1	1	1			1	1	1			100.00	100.00	100.00	-	-
			Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah		1	1	1			1	1	1			100.00	100.00	100.00	-	-
			Jumlah Peserta Bimtek				70					70			-	-	100.00	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Presentase Kelancaran Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			100%					100%				-	100.00	-	-	-
			Jumlah Peserta Bimtek			100					100	-			-	100.00	-	-	-
			Jumlah Peserta Bimtek			65					65	-			-	100.00	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah		1	1	1			1	1	1			100.00	100.00	100.00	-	-
			Penilaian harga aset			1	1					1			-	-	100.00	-	-
			Peningkatan sumber pendapatan daerah		1	1	1			1	1	1			100.00	100.00	100.00	-	-
			Jumlah DPA dan DPPA SKPD dan UPTD		170	170	69			170	170	69			100.00	100.00	100.00	-	-
			Jumlah pelaksanaan penyusunan akuntansi		4	4	4			4	4	4			100.00	100.00	100.00	-	-
			Daftar Aset yang dimiliki		1	1	1			1	1	1			100.00	100.00	100.00	-	-
			Ketersediaan Peta Aset Daerah		1					1		-			100.00	-	-	-	-
			Tersedianya Laporan perkembangan pendapatan daerah		1	1	1			1	1	1			100.00	100.00	100.00	-	-
			Tersedianya PPAS dan Nota Keuangan APBD		1	1	1			1	1	1			100.00	100.00	100.00	-	-
			Jumlah SKPD yang dibimbing dalam penerpan SIAKUDA		67	67				67	67	-			100.00	100.00	-	-	-
			Terlaknanya monev aplikasi SIMBADA			1	1				1	1			-	100.00	100.00	-	-
			Jumlah pelaksanaan pemeliharaan dan penghapusan aset			1	1				1	1			-	100.00	100.00	-	-
			Tersedianya Jaringan Sitem Informasi Keuangan Daerah			1	1				1	1			-	100.00	100.00	-	-
			Pendataan Aset milik daerah			1	1				1	1			-	100.00	100.00	-	-
			tersedianya Coffee Morning				1				-	1			-	-	100.00	-	-
			Monev Pendapatan Daerah yang Terlaksana				1				-	1			-	-	100.00	-	-
			Tersedinya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa				1				-	1			-	-	100.00	-	-
			Jumlah peserta Bimtek				70				-	70			-	-	100.00	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA	Target NSPK	IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah faktur pajak				1				-	1		1	-	-	100.00	-	-
			Jumlah exsampler Perda				1				-	1		1	-	-	100.00	-	-
			Jumlah exsampler Perda				1				-	1		1	-	-	100.00	-	-
			Persentase pengembalian kerugian negara			100%	100%	100%	100%		60%	80%	100%	80%	-	60.00	80.00	100.00	80.00
			Jumlah kasus TGR			5	5	5	5		3	4	5	4	-	60.00	80.00	100.00	80.00

Sumber : Sekretariat BPKAD 2019

Tabel 2.3

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	BELANJA DAERAH	32.440.790.057	42.220.158.657	51.121.586.250	56.157.485.986	58.801.268.902	62.345.441.629	34.493.538.829	41.785.875.919	49.725.721.936	54.131.120.978	54.222.606.529	58.583.747.753	106,33	98,97	97,27	96,39	92,21	93,97	14,36	11,44
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.162.868.700	16.144.101.700	18.784.013.500	22.758.192.000	23.109.582.000	24.195.441.629	13.658.009.901	16.813.689.653	18.846.590.826	21.838.694.665	19.508.819.316	21.725.750.319	122,35	104,15	100,33	95,96	84,42	89,79	17,68	10,35
	BELANJA PEGAWAI	11.162.868.700	16.144.101.700	18.784.013.500	22.758.192.000	23.109.582.000	24.195.441.629	13.658.009.901	16.813.689.653	18.846.590.826	21.838.694.665	19.508.819.316	21.725.750.319	122,35	104,15	100,33	95,96	84,42	89,79	17,68	10,35
	BELANJA LANGSUNG	21.277.921.357	26.076.056.957	32.337.572.750	33.399.293.986	35.691.686.902	38.150.000.000	20.835.528.928	24.972.186.266	30.879.131.110	32.292.426.313	34.713.787.213	36.857.997.434	97,92	95,77	95,49	96,69	97,26	96,61	12,72	12,35
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.688.560.057	18.660.722.940	24.553.917.500	24.786.853.496	26.363.459.152	26.360.127.850	15.532.524.355	18.571.414.569	24.365.044.416	24.342.011.291	26.172.895.682	26.112.722.453	99,01	99,52	99,23	98,21	99,28	99,06	11,56	11,59
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	15.000.000	15.000.000			-	8.825.000	15.000.000	14.985.000	-		-	88,25	100,00	99,90	-	-	-	(10,00)	(6,03)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	13.718.641.650	16.229.908.690	21.577.348.250	21.041.254.496	21.653.743.750	22.171.200.000	13.631.970.355	16.199.512.994	21.511.142.722	20.717.518.182	21.648.461.693	22.044.349.036	99,37	99,81	99,69	98,46	99,98	99,43	10,81	10,85
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	407.700.000	427.500.000	490.100.000	622.180.000	800.560.000	657.456.948	368.439.000	407.109.000	461.555.000	568.298.000	730.977.513	616.320.520	90,37	95,23	94,18	91,34	91,31	93,74	11,45	11,99
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		268.767.500				-		268.743.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		341.632.500				-		341.516.400	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	122.268.407	122.268.000	203.500.000	335.000.000	262.467.902	304.467.902	106.890.000	122.225.000	203.498.000	330.315.000	298.180.000	304.350.000	87,42	99,96	100,00	98,60	113,61	99,96	25,08	27,10
	Penyediaan Makanan dan Minuman		370.850.000				-		366.764.800	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengelolaan Gaji		284.796.250	289.039.250	297.164.000	449.605.000	337.929.000		279.194.200	287.243.300	285.396.300	449.505.300	336.809.300	-	-	-	-	-	-	26,15	26,93
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	570.000.000	600.000.000	660.000.000	790.000.000	775.000.000	945.000.000	560.617.300	571.349.175	650.963.994	761.866.609	682.995.626	905.877.597	98,35	95,22	98,63	96,44	88,13	95,86	11,00	11,03
	Penyediaan ongkos kantor	859.950.000					-	855.782.700		-	-		-	99,52	-	-	-	-	-	(20,00)	(20,00)
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			1.318.930.000	1.701.255.000	2.422.082.500	1.944.074.000			1.235.656.400	1.678.617.200	2.362.775.550	1.905.016.000	-	-	-	-	-	-	30,32	31,45
2	<b>PROGRAM PENINGKATAMN SARANA DAM PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.314.150.000</b>	<b>2.313.402.267</b>	<b>1.373.376.000</b>	<b>1.911.800.000</b>	<b>1.246.100.000</b>	<b>4.247.325.000</b>	<b>2.204.504.545</b>	<b>2.205.019.007</b>	<b>1.337.510.907</b>	<b>1.872.086.600</b>	<b>1.222.223.801</b>	<b>4.187.673.946</b>	<b>95,26</b>	<b>95,31</b>	<b>97,39</b>	<b>97,92</b>	<b>98,08</b>	<b>98,60</b>	<b>40,91</b>	<b>41,71</b>
	Pembangunan gedung Kantor	23.250.000					50.000.000	23.250.000		-			49.500.000	100,00	-	-	-	-	-	(20,00)	(20,00)
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.528.000.000	932.300.000	47.616.000	514.000.000	87.500.000	2.864.000.000	1.528.000.000	844.170.650	46.174.500	508.499.000	86.771.000	2.864.000.000	100,00	90,55	96,97	98,93	99,17	100,00	787,15	795,94
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		62.000.000	60.000.000	374.500.000	60.000.000	-		62.000.000	60.000.000		60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	87,39	(0,65)
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	123.150.000	61.900.000	135.650.000	199.800.000	117.000.000	75.000.000	113.400.000	57.900.000	131.650.000	199.800.000	117.000.000	74.200.000	92,08	93,54	97,05	100,00	100,00	98,93	7,87	10,44
	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	222.300.000		30.000.000			-	222.300.000	-	30.000.000			-	100,00	-	100,00	-	-	-	(20,00)	(20,00)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		363.892.267				73.000.000		363.887.000	-			72.293.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor		320.400.000	228.960.000		221.000.000	299.225.000		320.400.000	227.960.000	374.500.000	220.000.000	295.950.000	-	-	-	-	-	-	21,37	53,99
	Pengadaan Mebelur			75.000.000	157.500.000	38.000.000	87.500.000		-	75.000.000	157.500.000	38.000.000	87.400.000	-	-	-	-	-	-	52,88	52,83

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000	92.720.000	115.000.000	255.000.000	320.000.000	280.000.000	79.773.045	90.655.820	103.969.346	233.974.100	305.822.801	268.627.946	99,72	97,77	90,41	91,75	95,57	95,94	34,93	34,38
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	181.950.000	198.650.000	198.650.000	155.000.000	206.100.000	211.100.000	145.966.500	198.103.750	193.580.000	154.965.000	200.780.000	174.550.000	80,22	99,73	97,45	99,98	97,42	82,69	4,52	6,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	155.500.000	241.540.000	182.500.000	181.000.000	196.500.000	307.500.000	91.815.000	239.352.000	174.733.000	167.848.500	193.850.000	301.153.000	59,05	99,09	95,74	92,73	98,65	97,94	19,02	40,12
	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Dinas			230.000.000	75.000.000		-		-	229.680.000	75.000.000		-	-	-	-	-	-	-	(13,48)	(13,47)
	Pengelolaan Fasilitas Aset		40.000.000	70.000.000			-		28.549.787	64.764.061			-	-	-	-	-	-	-	15,00	25,37
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>9.230.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>58.125.000</b>	-	<b>44.000.000</b>	<b>8.840.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>53.025.000</b>	-	<b>43.560.000</b>	<b>95,77</b>	<b>100,00</b>	<b>99,58</b>	<b>91,23</b>	-	-	<b>40,40</b>	<b>38,44</b>
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	9.230.000	23.600.000	23.600.000	36.000.000		44.000.000	8.840.000	23.600.000	23.500.000	30.900.000		43.560.000	95,77	100,00	99,58	85,83	-	-	21,65	19,61
	Pendidikan dan Pelatihan Formal				22.125.000		-		-	-	22.125.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>68.800.000</b>	<b>68.800.000</b>	<b>62.311.000</b>	<b>94.000.000</b>	<b>344.750.000</b>	<b>289.000.000</b>	<b>59.166.502</b>	<b>45.925.000</b>	<b>32.561.000</b>	<b>76.585.600</b>	<b>296.782.000</b>	<b>272.229.400</b>	<b>86,00</b>	<b>66,75</b>	<b>52,26</b>	<b>81,47</b>	<b>86,09</b>	<b>94,20</b>	<b>58,40</b>	<b>72,59</b>
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	38.800.000	38.800.000	23.800.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	34.516.502	18.750.000	-	22.600.000	29.450.000	26.500.000	88,96	48,32	-	56,50	73,63	66,25	5,88	(5,08)
	Sosialisasi Pajak	30.000.000	30.000.000	38.511.000	54.000.000	54.750.000	49.000.000	24.650.000	27.175.000	32.561.000	53.985.600	54.750.000	48.400.000	82,17	90,58	84,55	99,97	100,00	98,78	11,90	17,14
	Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah					250.000.000	200.000.000		-	-		212.582.000	197.329.400	-	-	-	-	-	-	16,00	18,57



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	116.540.000	122.840.000	297.170.000	412.415.000	537.140.000	551.823.600	110.510.000	120.340.000	287.152.500	402.289.500	512.671.000	542.158.829	94,83	97,96	96,63	97,54	95,44	98,25	43,82	44,16
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					45.710.000	100.455.300		-	-	-	42.726.000	97.969.129	-	-	-	-	-	-	43,95	45,86
	Penelitian dan verifikasi surat pertanggungj awaban	116.540.000	122.840.000				-	110.510.000	120.340.000	-	-			94,83	97,96	-	-	-	-	(18,92)	(18,22)
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			35.570.000	39.130.000	29.197.500	39.974.100		-	33.182.500	39.112.500	29.197.500	39.804.100	-	-	-	-	-	-	24,31	25,77
	Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi				56.985.000	56.320.000	36.960.000		-		46.877.000	56.020.000	36.619.000	-	-	-	-	-	-	12,89	16,97
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban			261.600.000	316.300.000	342.400.000	286.400.000		-	253.970.000	316.300.000	342.260.000	286.399.000	-	-	-	-	-	-	22,56	23,29
	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran					63.512.500	88.034.200		-	-	-	42.467.500	81.367.600	-	-	-	-	-	-	27,72	38,32
6	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI			30.652.500						30.602.500				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi			30.652.500					-	30.602.500				-	-	-	-	-	-	-	-
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	209.855.000	276.556.000	221.255.000	276.610.000	295.520.000	265.880.100	199.596.082	223.326.900	208.587.049	250.040.400	285.595.386	263.274.170	95,11	80,75	94,27	90,39	96,64	99,02	6,72	6,31
	Peningkatan pelaksanaan dana kas daerah oleh BUD	209.855.000	221.255.000	221.255.000	276.610.000	295.520.000	265.880.100	199.596.082	188.015.900	208.587.049	250.040.400	285.595.386	263.274.170	95,11	84,98	94,27	90,39	96,64	99,02	5,45	6,28

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa		55.301.000				-		35.311.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
8	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI KERJASAMA DAN INVESTASI		-	-	40.000.000	74.770.000	-	-	-	-	36.000.000	74.770.000	-	-	-	-	-	-	-	17,39	21,54
	Penyelenggaraan Pameran investasi				40.000.000	74.770.000	-			-	36.000.000	74.770.000	-	-	-	-	-	-	-	17,39	21,54
9	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	-	250.000.000	50.050.000	-	-	-	-	236.877.600	10.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,00)	(19,13)
	Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan		200.000.000				-		199.825.000	-	-			-	-	-	-	-	-	(20,00)	(20,00)
	Pengelolaan Administrasi Kearsipan		50.000.000	50.050.000			-		37.052.600	10.330.000	-			-	-	-	-	-	-	(19,98)	(34,42)
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI ,INFORMASI DAN MEDIA MASSA	-	-	75.500.000	-	15.000.000	39.310.000	-	-	75.205.000	-	12.488.000	37.290.000	-	-	-	-	-	-	52,41	59,72
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi			75.500.000		15.000.000	39.310.000			75.205.000	-	12.488.000	37.290.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	52,41	59,72
11	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	14.083.500	35.687.500	336.473.500	308.359.500	210.473.000	236.244.500	11.500.000	11.907.500	135.752.000	133.036.250	131.777.500	123.399.300	81,66	33,37	40,35	43,14	62,61	52,23	193,68	206,86
	Penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	14.083.500	35.687.500	336.473.500	308.359.500	210.473.000	236.244.500	11.500.000	11.907.500	135.752.000	133.036.250	131.777.500	123.399.300	81,66	33,37	40,35	43,14	62,61	52,23	193,68	206,86
12	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	845.225.000	1.038.419.000	1.279.893.000	5.129.822.800	6.438.374.750	5.937.084.200	842.488.300	1.007.280.100	1.231.591.700	4.796.940.782	5.840.855.118	5.116.912.886	99,68	97,00	96,23	93,51	90,72	86,19	72,93	68,14

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penyusunan Standar Satuan Harga		117.021.000	122.786.000	134.532.500	124.472.500	128.702.500		107.770.000	107.530.000	127.813.500	118.957.000	110.556.000	-	-	-	-	-	-	2,08	20,93
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	162.270.000	136.325.000	195.340.000	148.637.300	205.955.680	174.835.000	162.258.000	136.224.000	195.302.400	148.637.300	205.955.680	174.259.967	99,99	99,93	99,98	100,00	100,00	99,67	5,37	5,32
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	128.535.000	147.010.000	195.730.000	149.908.000	162.440.000	152.037.100	128.006.400	146.825.000	195.446.600	149.908.000	162.405.500	149.983.250	99,59	99,87	99,86	100,00	99,98	98,65	5,21	5,04
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	183.780.000	169.560.000	215.240.000	197.340.000	208.090.000	203.250.000	183.779.000	169.217.000	202.085.600	189.882.850	202.127.500	190.407.741	100,00	99,80	93,89	96,22	97,13	93,68	2,80	1,22
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	133.760.000	162.825.000	190.620.000	209.220.000	192.775.000	216.575.000	133.613.000	162.055.600	189.457.200	202.841.200	181.184.500	200.014.145	99,89	99,53	99,39	96,95	93,99	92,35	10,61	9,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	128.085.000	157.400.000	182.056.000	233.894.000	250.844.000	253.910.000	126.512.500	156.761.000	181.467.200	233.336.650	247.713.700	249.217.970	98,77	99,59	99,68	99,76	98,75	98,15	15,10	15,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	108.795.000	148.278.000	178.121.000	181.566.000	189.898.500	167.121.900	108.319.400	128.427.500	160.302.700	180.610.100	177.985.500	154.569.260	99,56	86,61	90,00	99,47	93,73	92,49	10,19	8,29
	Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan daerah				213.634.000	490.234.000	266.954.000				213.634.000	488.634.000	266.504.000	-	-	-	-	-	-	36,79	36,65
	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				128.371.500	361.991.500	338.321.750				114.357.000	92.969.000	109.835.850	-	-	-	-	-	-	55,09	19,89
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.				518.740.000	459.781.500	416.994.000				452.290.946	408.714.843	364.507.378	-	-	-	-	-	-	15,87	15,91
	Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah				325.871.000		-				316.525.250			-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD				294.800.000	291.528.500	311.626.000				287.647.400	290.895.500	311.336.900	-	-	-	-	-	-	21,16	21,63

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengamanan aset daerah				158.281.500	173.866.000	171.134.500				116.596.000	146.628.200	141.834.300	-	-	-	-	-	-	21,66	24,50
	Peningkatan pengelolaan adminsitasi pendapatan daerah.				182.927.250		-				180.921.500			-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Prioritas dan flafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD				98.170.000	112.129.320	111.072.500				97.635.000	97.200.000	108.562.950	-	-	-	-	-	-	22,66	22,25
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA-BMD				164.434.500	292.430.000	91.810.000		-	-	104.505.000	287.460.500	88.497.000	-	-	-	-	-	-	21,85	41,17
	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah				135.886.000	139.016.000	119.216.900				99.652.000	104.148.900	87.695.000	-	-	-	-	-	-	17,61	17,74
	Labelisasi Aset Barang Daerah				67.382.000		-		-		59.600.000			-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pengelolaan adminsitasi Retribusi daerah.				142.129.000		-		-	-	139.377.800			-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa				70.555.000	82.625.000	61.368.000		-		60.067.400	73.096.000	47.536.000	-	-	-	-	-	-	18,28	17,34
	Bimbingan Teknis Implementasi tentangPengelolaan Barang Milik Daerah					62.745.000	97.290.000		-			59.493.000	61.006.000	-	-	-	-	-	-	31,01	20,51
	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah				195.072.750	111.572.750	139.572.750		-		194.480.500	111.572.750	139.572.700	-	-	-	-	-	-	16,46	16,49
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tahun Berikut				105.050.000	124.050.000	157.740.000		-		103.647.500	123.977.837	105.423.100	-	-	-	-	-	-	29,05	20,93
	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabarab APBD Tahun Berikut				116.800.000	128.215.000	141.670.000		-		116.727.586	116.531.750	80.765.900	-	-	-	-	-	-	24,05	13,83

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penilaian Barang Milik Daerah				83.705.500	121.275.500	134.980.250		-	-	60.855.500	103.921.500	68.182.000	-	-	-	-	-	-	31,24	27,28
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah					137.350.000	-		-	-		118.877.308		-	-	-	-	-	-	-	-
	Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah				150.000.000				-	-	147.462.800			-	-	-	-	-	-	-	-
	Penigkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				411.445.000	439.945.000	431.890.000		-	-	411.065.000	439.206.750	420.718.800	-	-	-	-	-	-	21,02	20,53
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				161.420.000		-		-	-	156.421.000			-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Administrasi Data Kaearsipan Keuangan				50.050.000	50.050.000	37.500.000		-	-	31.653.500	31.161.800	28.527.000	-	-	-	-	-	-	14,99	18,00
	Pengelolaan sistem dan vertifikasi surat perintah membayar					369.572.750	320.972.750		-	-		367.017.750	320.372.500	-	-	-	-	-	-	17,37	17,46
	Peningkatan Pelaporan Adminstrasi Keuangan Daerah					285.927.250	389.600.000		-	-		285.669.900	382.271.150	-	-	-	-	-	-	27,25	26,76
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah					405.004.000	389.953.800		-	-		401.710.000	377.420.750	-	-	-	-	-	-	19,26	18,79
	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					225.725.000	245.065.000		-	-		196.598.750	222.354.500	-	-	-	-	-	-	21,71	22,62
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal				100.000.000		90.198.000		-	-	98.788.500		39.828.800	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaporan Aset					88.865.000	175.722.500		-	-		69.707.200	115.151.975	-	-	-	-	-	-	19,55	13,04

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD					150.000.000	-		-	-	-	129.332.500		-	-	-	-	-	-	-	-
12	<b>PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2.011.477.800</b>	<b>450.200.000</b>	<b>3.746.074.250</b>	<b>198.808.190</b>	-	-	<b>1.866.399.144</b>	<b>450.022.490</b>	<b>2.987.693.500</b>	<b>198.808.190</b>	-	-	<b>92,79</b>	<b>99,96</b>	<b>79,76</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>91,96</b>	<b>58,93</b>
	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah (Akuntansi)	106.600.000	160.500.000	190.500.000			-	106.505.000	160.330.000	190.490.000				99,91	99,89	99,99	-	-	-	(6,15)	(6,13)
	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah (Anggaran)	180.945.000	289.700.000	385.570.000			-	180.223.678	289.692.490	371.720.000				99,60	100,00	96,41	-	-	-	(1,36)	(2,19)
	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			116.005.000						68.664.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			176.621.400			-			176.620.000				-	-	-	-	-	-	-	-
13	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>2.653.329.250</b>						<b>1.988.638.500</b>					-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Anggaran)		72.165.000				-		72.165.000	-				-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		130.595.000				-		122.845.000	-				-	-	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.	617.581.500	219.400.000	291.955.000				539.892.966	186.792.000	244.125.000				87,42	85,14	83,62	-	-	-	(26,28)	(26,94)
	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah		468.785.000	77.627.500			-			48.270.000				-	-	-	-	-	-	(36,69)	-
	Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	133.623.800	120.000.000	120.000.000			-	118.306.900	98.550.000	111.590.000				88,54	82,13	92,99	-	-	-	(22,04)	(20,69)
	Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD	190.500.000	190.850.000	230.800.000				190.385.500	190.097.500	226.508.000				99,94	99,61	98,14	-	-	-	(15,78)	(16,20)
	Penyusunan akuntansi tugas perbantuan	25.000.000	31.785.000	28.750.000			-	23.435.000	24.815.000	28.220.000				93,74	78,07	98,16	-	-	-	(16,48)	(16,08)
	Pengamanan aset daerah	78.981.500	96.420.250	138.506.500				67.485.000	82.640.000	97.745.000				85,44	85,71	70,57	-	-	-	(6,85)	(11,85)
	Peningkatan pengelolaan administrasi pendapatan daerah.	107.500.000	140.000.000	185.000.000			-	94.057.500	135.340.000	176.085.000				87,50	96,67	95,18	-	-	-	(7,52)	(5,20)
	Studi Banding Pengelolaan Keuangan Daerah				198.808.190		-				198.808.190			-	-	-	-	-	-	-	-
	Sensus barang daerah	267.246.000					-	242.867.600		-				90,88	-	-	-	-	-	(20,00)	(20,00)
	Penyusunan Prioritas dan flafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	53.500.000	73.800.000	86.470.000				53.340.000	73.800.000	86.195.000				99,70	100,00	99,68	-	-	-	(8,98)	(8,97)
	Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah Pada SKPD	250.000.000	350.000.000				-	249.900.000	349.546.000	-				99,96	99,87	-	-	-	-	(12,00)	(12,03)
	Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIMBADA		265.400.000	324.373.600			-		229.140.000	99.082.500				-	-	-	-	-	-	4,44	(11,35)
	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah		84.050.000	113.361.500					70.628.000	72.635.000				-	-	-	-	-	-	6,97	0,57

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pembangunan Jaringan Sitem Informasi Keuangan Daerah		335.000.000	150.000.000			-		284.870.000	149.000.000				-	-	-	-	-	-	(11,04)	(9,54)
	Inventarisasi Aset Milik Pemda		75.079.000	209.229.000			-		67.410.000	149.750.000				-	-	-	-	-	-	35,74	24,43
	Labelisasi Aset Barang Daerah			72.960.000			-		-	13.755.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Ceffee Morning Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah			161.796.000			-		-	56.500.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah			195.000.000			-		-	189.040.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa			83.486.000					-	49.600.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi tentangPengelolaan Barang Milik Daerah			102.240.000					-	92.375.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah			117.072.750					-	107.029.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD tahun Berikut			89.950.000					-	84.425.000				-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabarab APBD Tahun Berikut			98.800.000					-	98.270.000				-	-	-	-	-	-	-	-
14	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	-	182.500.000	287.300.000	182.500.000	166.100.000	179.204.750	-	87.834.600	153.600.538	131.602.700	163.728.726	158.776.450	-	-	-	-	-	-	23,97	36,39



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Peningkatan Pelaksanaan TGR		182.500.000	287.300.000	182.500.000	166.100.000	179.204.750		87.834.600	153.600.538	131.602.700	163.728.726	158.776.450	-	-	-	-	-	-	23,97	36,39

Sumber : Sekretariat BPKAD 2019

Kinerja BPKAD Kabupaten Bone berdasarkan pada Tabel 2.2, secara umum pencapaian sasaran meningkat dan melampaui target yang telah ditentukan, pencapaian program dan kegiatan dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya, namun program yang memiliki kontribusi besar dalam pencapaian target sasaran yaitu program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rasio capaian 100. Capaian masing-masing indikator kinerja, diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Tercapainya Opini WTP**

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan menyajikan :

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Bupati. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas :

I.Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD);

II.Entitas Pelaporan ( SK-PKD );

Melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bone secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi SAP Berbasis Akrua.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrua bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3) Pengendalian deficit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Penerapan akuntansi berbasis akrua di Pemerintah Kabupaten Bone memasuki tahun ke 3 pada tahun 2018 ini, walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrua dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain:

- 1) Belum seluruhnya PPK-SKPD memahami dengan baik konsep akuntansi berbasis akrua pada Pemerintah Daerah;
- 2) Permasalahan aset yang memerlukan penanganan secara lebih cermat antara lain :
  - a. Persoalan penyerahan aset kepada SKPD pengguna
  - b. Penanganan aset perolehan hibah yang tidak melalui mekanisme APBD
- 3) Perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi dengan memasukkan hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi

Laporan Keuangan dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi

keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar.

Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrua tahun 2016 antara lain :

- 1) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrua dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual;
- 2) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrua;
- 3) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- 4) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- 2) Laporan Arus Kas (LAK),
- 3) Neraca
- 4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL);
- 5) Laporan Operasional ( LO );
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tiga kalinya setelah 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 , 2016 dan tahun 2017.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP );
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Namun demikian penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK–RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017, terdapat beberapa cacatan yaitu:

- 1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Belum dikelola secara cermat;
- 2) Kelebihan pembayaran atas Tunjangan Komunikasi Insentif, dana Operasional dan Tunjangan Reses Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone;
- 3) Belanja Honorarium dan Jasa/Upah Kerja kepada empat SKPD tidak sesuai ketentuan;
- 4) Realisasi Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.110.627.564.30;dan
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa belum disampaikan kepada Bupati Bone sebesar Rp.1.579.401.444,00

## **2. Trend Kenaikan PAD 15% per tahun**

Peranan Pendapatan Asli Daerah di dalam penerimaan Pemerintah Daerah sangat diharapkan dalam pembangunan daerah. Salah satu indikator turunnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah meningkatnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun eksentifikasi sehingga daerah memiliki dana signifikan dalam rangka membiayai pembangunan daerah guna mensejahterahkan masyarakat.

Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan capaian Persentase Peningkatan PAD telah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 75,56% (tujuh puluh lima koma lima puluh enam persen), dari target 75% (tujuh puluh lima persen), dengan persentase capaian 100.75%

Jumlah realisasi PAD tahun 2018

Target PAD tahun 2018

Rp.214.213.155.032 (75,56%)

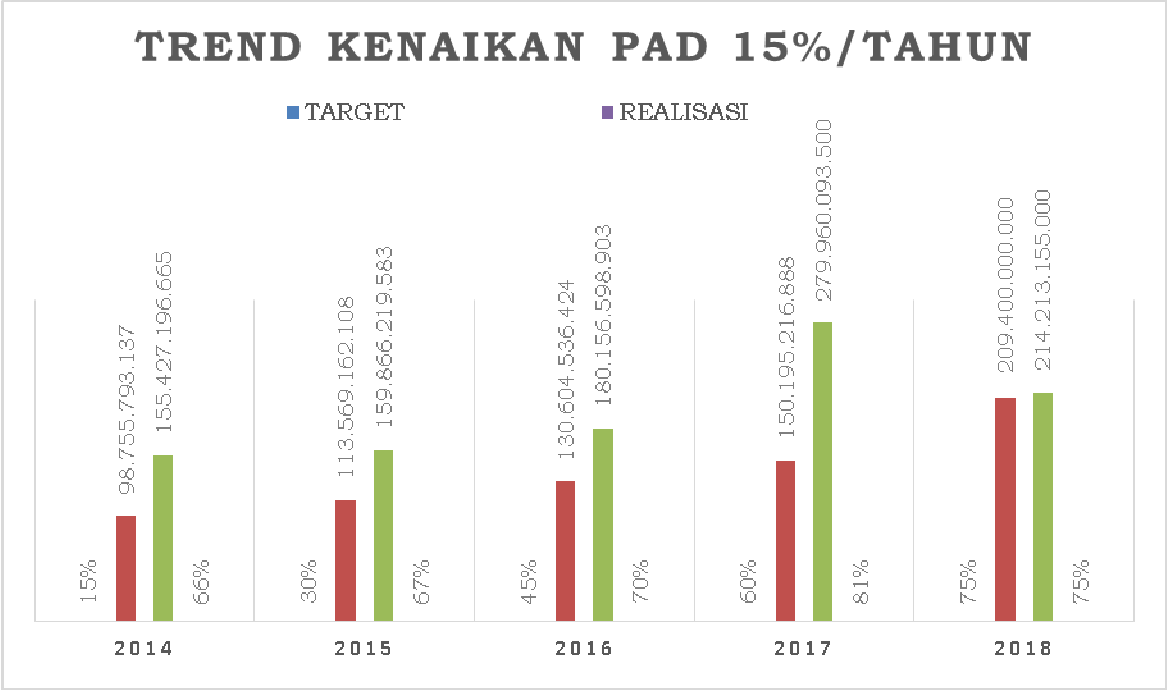
Rp.209.400.000.000 (75,00%)

X 100

X 100

= 100,75%

Grafik 2.1  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2018



Sumber : Bidang Akuntansi BPKAD 2019

Pada tahun 2018 capaian realisasi Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 100.75% diperoleh dari beberapa sektor pendapatan, antara lain:

Tabel 2.4  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	TARGET	RELISASI	CAPAIAN %
1,1	Pendapatan Asli Daerah	199.472.831.779	214.213.155.033	107,39
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.636.794.167	51.236.484.457	123,06
1.1.2	Pendaptan Retribusi Daerah	22.455.566.712	19.652.213.419	87,52
1.1.3	Pendaptan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	7.092.406.600	7.055.937.640	99,49
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.288.064.300	136.268.519.517	106,22

Sumber : Bidang Akuntansi BPKAD 2019

Realisasi PAD dari sektor Pajak realisasi sebesar Rp.51.271.353.220 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp.41.636.794.167 dengan persentase 123.06%, realisasi sektor retribusi daerah dengan capaian Rp.19.652.213.419 kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.22.455.566.712 dengan persentase 87.52%. Adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdampak terbatasnya peluang Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi sektor Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dengan capaian Rp.7.055.937.640 kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp.7.092.406.600 dengan persentase 99,49%, dan realisasi sektor Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan capaian Rp.136.268.519.517 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 128.288.064.300 dengan persentase 106,22%.

### **3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bone. Oleh sebab itu BPKAD Kab. Bone harus mampu melakukan penatausahaan aset daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

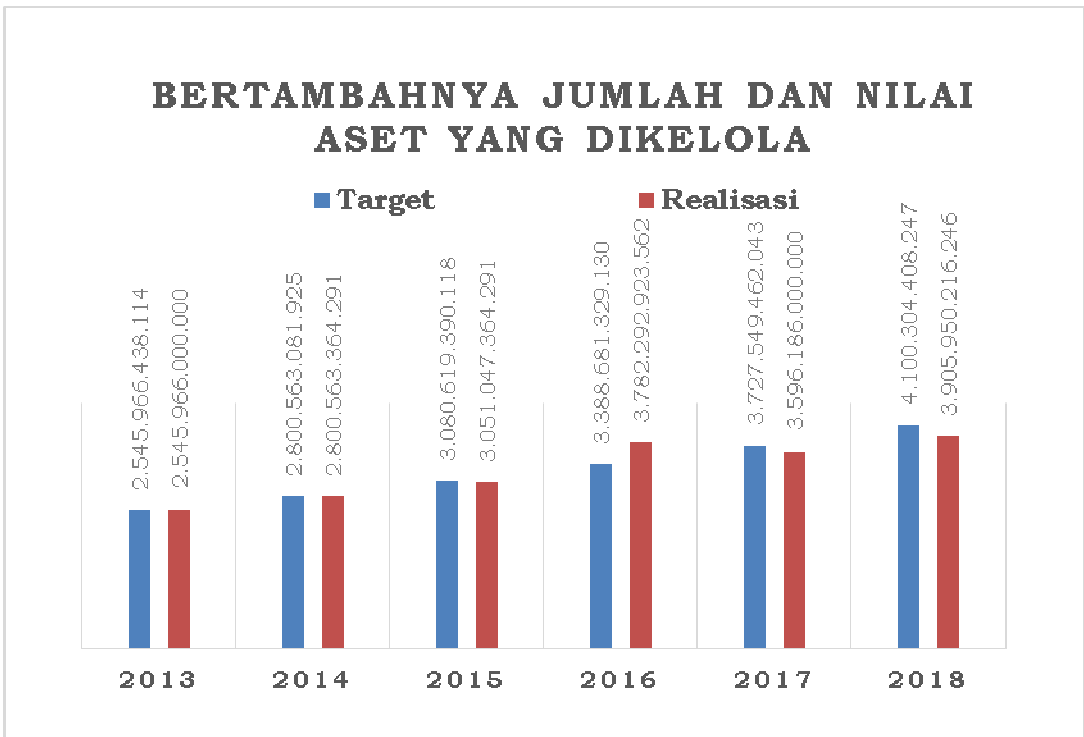
- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (Neraca), yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Peningkatan manajemen aset meliputi : penertiban, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan APBD termasuk perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendorong pencapaian pemberian opini/pendapat pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi:

- 1) pengamanan fisik,
- 2) pengamanan administratif dan
- 3) pengamanan hukum.

Grafik 2.2  
Target dan Realisasi Jumlah dan Nilai Aset yang dikelola Tahun 2013-2018



Sumber : Bidang Aset BPKAD 2019

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 95.26% dari target Rp.4.100.304.408.247, mengalami penurunan dari tahun 2017 yang mencapai 96.48% dari target Rp. 3.727.549.462.043,-, realisasi tahun 2016 merupakan capaian yang sangat tinggi selama priode 2013-2018 yaitu mencapai 111.62% dari target Rp.3.388.681.329.1301- mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 99.04% dari target Rp. 3.080.619.390.118,-.

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:



a. Layanan internal BPKAD, dalam bentuk penyelenggaraan program:

1. Administrasi Perkantoran, selama tahun 2013-2018 telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam menyediakan layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, selama tahun 2013-2018 telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang dibutuhkan dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perkantoran.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur, selama tahun 2013-2018 telah mengalami pencapaian yang sangat baik setiap tahunnya dalam menyediakan pakaian seragam untuk seluruh ASN BPKAD Kabupaten Bone.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, selama tahun 2013-2018 telah mengalami pencapaian yang sangat baik setiap tahunnya dalam pelaksanaan sosialisasi. Dalam peningkatan kapasitas ASN belum merata.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, selama tahun 2013-2018 telah mengalami pencapaian yang sangat baik setiap tahunnya dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, laporan ikhtisar capaian kinerja dan laporan realisasi APBD, serta SPJ SKPD.

b. Layanan Lintas SKPD, dituangkan dalam bentuk program:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, selama tahun 2013-2018 telah mengalami pencapaian yang sangat baik setiap tahunnya dalam pelaksanaan penerbitan SP2D yang sesuai SPM.
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, selama tahun 2013-2018 telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan APBD dan Perubahan APBD, Penyajian Laporan Keuangan dan Laporan BMD SKPD sesuai SAP berbasis Akrua, dan percepatan penyaluran belanja daerah, serta pensertifikatan bidang lahan aset daerah (Pasar Palakka).
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, selama tahun 2013-2018 telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Sedangkan untuk kinerja keuangan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3, dapat dikatakan bahwa realisasi keuangan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Evaluasi Kinerja BPKD Kabupaten Bone selama 5 Tahun terakhir, maka untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi

target dan capaian kinerja BPKD Kabupaten Bone, kondisi lingkungan yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Bone, diuraikan sebagai berikut:

#### **2.4.1. Tantangan**

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Upaya untuk mempertahankan perolehan Opini WTP dari BPK RI atas Audite Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Masih banyak OPD yang menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Milik Barang Daerah tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual; dan
4. Penerapan implementasi Transaksi Non Tunai terhadap seluruh belanja daerah dan SP2D online yang dikerjasamakan dengan Bank Pembangunan Daerah SulselBar.
5. Pengintegrasian Aplikasi perencanaan, penggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan APBD

#### **2.4.2. Peluang**

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Bone disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Bone dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
4. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Penganggaran Keuangan Daerah telah terwujud.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Salah satu agenda pembangunan daerah Kabupaten Bone adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang mengikuti kaidah-kaidah *good governance* serta berbasis pada visi dan misi Kepala Daerah. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi.

Berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang kinerja pelayanan BPKAD yang berdaya guna dan berhasil guna, secara spesifik identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

##### **1. Perencanaan Keuangan Daerah**

Perencanaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang anggotanya termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil koordinasi perencanaan keuangan pada TAPD selanjutnya dibahas bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah adalah:

- a. Proses pembahasan RAPBD Kabupaten Bone pada DPRD masih didominasi pendekatan politis, sehingga pembahasan rancangan APBD seringkali berlangsung alot, yang mengakibatkan penetapan APBD juga berlangsung lama;
- b. Kemampuan keuangan daerah yang tidak seimbang dengan perencanaan belanja pada program dan kegiatan di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan banyak program dan kegiatan yang kurang

- mendapat dukungan dari segi pendanaan;
- c. Adanya OPD yang belum mengikuti perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan RKA, sehingga masih sering diperoleh rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi BPKD Provinsi atas RAPBD Kabupaten;
- d. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut;
- e. Proporsi pengalokasian belanja pembangunan lebih rendah dibandingkan belanja aparatur;
- f. Belum terealisasinya pengalokasian belanja modal minimum 30% terhadap APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perencanaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya fungsi perencanaan dan distribusi dalam penyusunan APBD*.

## 2. Perbendaharaan Keuangan Daerah

Pengelolaan administrasi perbendaharaan yang tertib dan cepat adalah salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tertib dapat diartikan bahwa proses administrasi perbendaharaan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SPM, SP2D harus memenuhi syarat kelengkapan, sehingga proses penerbitan SP2D dapat berjalan dengan lancar

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah, adalah:

- a. Pengelolaan Belanja hibah daerah, bantuan sosial, bantuan bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang masih memiliki kekurangan, dalam proses, perencanaan, penyaluran hingga pelaporannya;
- b. Pengelolaan gaji yang tidak cermat dalam proses pencairan, sering terjadi kelebihan bayar (purna bakti yang menerima gaji karena tidak dilaporkan ke BPKAD), aplikasi PT.Taspen yang digunakan belum mengaktifkan Batas Usia Pensiun secara otomatis untuk mendeteksi PNS yang memasuki masa purna bakti.
- c. Belum sepenuhnya penerapan Transaksi Non Tunai (TNT), berhadapan dengan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Perbendaharaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya pengelolaan belanja daerah*.

### 3. Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah

Raihan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Bone selama 3 kali sejak tahun 2015-2018 merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Bone.

Selain itu, Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah adalah;

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat. Kurang bisa diimbangi dengan kecepatan adaptasi pada tahap implementasi bahkan timbul kendala yang disebabkan adanya potensi tumpang tindih / tidak sinkron antara satu peraturan dengan yang lain, dan adanya multitafsir terhadap satu peraturan perundang-undangan. Misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun menggunakan SAP berbasis akrual. Penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum diimbangi dengan sumber daya aparatur yang memadai.
- b. Pembinaan kepada OPD dalam hal pelaporan keuangan dan aset harus terus ditingkatkan, khususnya dalam penerapan *accrual basic* agar tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban, sehingga menyajikan laporan keuangan dan aset masing- masing OPD yang akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya;
- c. Percepatan tindak lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang perlu ditingkatkan;
- d. Ketersediaan Dokumen SPJ SKPD yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas, dan penatausahaan keuangan pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang belum tertib sepenuhnya.

- e. Penatausahaan aset yang belum tertib sepenuhnya, sekitar 70% aset pemda belum tersertifikat dan ada beberapa yang belum teridentifikasi serta beberapa aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, dan Tagihan penjualan angsuran atas ruko, toko, kios dan lods Pasar Sentral Palakka Watampone belum didukung dengan bukti perikatan, dan pembelian yang telah lunas belum diproses bukti kepemilikannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
- 2) Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.

#### **4. Layanan Administrasi Perkantoran**

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi membutuhkan layanan administrasi perkantoran yang dikelola dengan baik dan cepat. Berbagai layanan administrasi perencanaan, keuangan, hingga administrasi kepegawaian dan umum harus diupayakan terlaksana dengan baik dan dapat memenuhi standar pelayanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi PNS dan juga stake holder lainnya. Olehnya itu dibutuhkan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka Layanan Administrasi Perkantoran, adalah:

- a. Standar Operasional Prosedur untuk masing- masing layanan administrasi yang diberikan kepada pihak luar disertai pemanfaatan penggunaan teknologi informasi yang mampu menghadirkan kecepatan layanan administrasi;
- b. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya adalah salah satu cara bagi aparatur untuk terus memperbaharui sekaligus meningkatkan wawasan/kemampuan, baik dalam hal pengelolaan keuangan, maupun administrasi umum dan pemerintahan lainnya. Untuk itu, ke depan diharapkan PNS lingkup BPKAD dapat secara rutin ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya aparatur, baik PNS pria maupun perempuan, golongan II, III hingga golongan IV dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, hingga muaranya adalah pemerataan kualitas SDM lingkup BPKAD yang memahami dan mampu menjalankan tupoksi yang melekat pada BPKAD secara professional;

- c. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BPKAD Kabupaten Bone yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah dapat disimpulkan bahwa *belum optimalnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusi Aparatur lingkup BPKAD*.

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018-2023 adalah ***Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera***. Visi ini dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).**
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Berkaitan dengan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana misi 1 yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**. Dengan program strategis pemerintah daerah yaitu: a) **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**, yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tujuan dari analisis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Bone. Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan dan aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas



pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui **3 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian** yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

**3.3.1      Telaahan Renstra Kementerian**

**Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI**

Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri RI adalah *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Berdasarkan Visi tersebut Kemendagri merumuskan tujuan yaitu diantaranya *"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah"*, dengan sasaran strategis meningkatkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efesien, akuntabel dan kompetitif.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Kemendagri RI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisifatif.  
Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.  
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien  
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.  
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.  
Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemendagri RI telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategis sebagai berikut:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
2. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi /Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
4. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah
5. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
6. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
7. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;

Mengkaji visi dan misi Kementerian Dalam Negeri RI memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone secara tepat waktu;
2. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja pada pelayanan masyarakat, terutama bidang infrastruktur 5%, bidang kesehatan 10%, dan bidang pendidikan 20%; dan
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiskal daerah.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

#### **Telaah Renstra Kementerian Keuangan RI**

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
- b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:

- 1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
- 2) Pencanaan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
- 3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- 4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- 5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;

- 6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energy;
- 7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah;

- 1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan system transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
- 4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
- 5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;
- 6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
- 7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
- 8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.

#### **Telaah Renstra Badan Pemeriksa Keuangan RI**

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut:

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui strategi:

Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku

kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu:

- a. Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
- b. Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

### **3.3.2 Telaahan Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan**

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah *"Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel"*. Berdasarkan Tujuan tersebut BPKD Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran yaitu *"Optimalisasi Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah"*.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan
2. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bone. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone tidak terkait erat / secara langsung dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Setelah melakukan telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka tidak terdapat rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan di Renstra BPKAD.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Lampiran C4 tentang Penyajian Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BPKAD Kabupaten Bone dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Bone.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis BPKAD Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, maka berikut ini rumusan isu strategis BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023:

1. Optimalisasi manajemen Aset Daerah;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual*;
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem pengelolaan barang milik daerah (E-Planning, E-Budgeting, dan SimBMD);
4. Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) dalam pengelolaan Kas Daerah yang berhadapan dengan percepatan realisasi APBD dan tertib administrasi;
5. Optimalisasi dan modernisasi pelayanan berbasis mutu, melalui Inovasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa akan datang, dengan mengangkat lima Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone serta dapat menjadikan BPKAD Kabupaten Bone sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel serta sehingga mempertahankan Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone (WTP) setiap tahunnya.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

***“Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”***

Indikator : 1. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD  
2. Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat  
3. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

**4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran BPKAD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparansi dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Indikator : 1. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator : 1. Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat  
2. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraa n tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD  "WTP"	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat  "81"	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat	77 (Baik)	80 (Baik)	83 (Baik)	89 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)
		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP  "A"		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB	BB	A	A	A

Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam arti dapat menjadi instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan. Adapun strategi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

<b>Visi:</b> Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD secara berkelanjutan	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
			Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berintegritas
			Meningkatkan konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta pelaporan pertanggungjawaban (Renstra, Renja, RKA, DPA/DPPA, SPJ dan LKjIP)
			Meningkatkan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana, serta penerbitan SP2D
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan,	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	Mengoptimalisasi fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web

	efektif, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Mendorong pengalokasian belanja modal 30%, belanja kesehatan 10%, dan belanja pendidikan 20% terhadap APBD
		Mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel
		Mendorong percepatan realisasi APBD
		Melakukan penyusunan dan mendorong penetapan Ranperda/Ranperkada APBD/APBD P dan pertanggungjawaban APBD tepat waktu
		Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monev baik secara langsung atau tidak langsung kepada OPD
		Melakukan inventarisasi dan pemetaan asset daerah
		Melakukan sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku TP-TGR

Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone . Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh BPKAD dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPKAD Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP oleh APUP A (BAIK)	1 2 0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	97%	28.286.340.950	98%	28.368.400.000	99%	28.935.768.000	100%	28.995.903.360	100%	28.996.241.360	100%	143.582.653.670		
			1 2 0 0 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah Rekening yang di Bayar	294 Rekening Listrik	3528 Rekening Listrik	24.542.473.650	3528 Rekening Listrik	24.500.000.000	3528 Rekening Listrik	24.990.000.000	3528 Rekening Listrik	25.000.000.000	3528 Rekening Listrik	25.000.000.000	17.640 Rekening Listrik	124.032.473.650	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
						20 Rekening Air	240 Rekening Air		240 Rekening Air		240 Rekening Air		2.880 Rekening Air							
						47 Rekening Telpn/Speede	564 Rekening Telpn/Speede		564 Rekening Telpn/Speede		564 Rekening Telpn/Speede		6.768 Rekening Telpn/Speede							
			1 2 0 0 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang menerima tunjangan dalam setahun	107 ASN	684 Kali	791.346.948	1.308 Kali	763.400.000	1.308 Kali	778.668.000	1.308 Kali	794.241.360	1.308 Kali	794.241.360	5.916 Kali	3.921.897.668	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	100 Media	624 Kali	262.467.902	624 Kali	320.000.000	624 Kali	326.400.000	624 Kali	332.928.000	624 Kali	333.000.000	3.120 Kali	1.574.795.902	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 1 3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah SPPD	979 SPPD	1000 SPPD	700.000.000	1100 SPPD	835.000.000	1100 SPPD	851.700.000	1150 SPPD	868.734.000	1150 SPPD	869.000.000	5500 SPPD	4.124.434.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 1 4	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	8 Paket	19 Paket	1.990.052.450	19 Paket	1.950.000.000	19 Paket	1.989.000.000	19 Paket	2.000.000.000	19 Paket	2.000.000.000	95 Paket	9.929.052.450	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang kondisi baik	97%	98%	3.543.580.300	99%	1.642.772.000	100%	1.425.200.000	100%	1.441.825.000	100%	1.502.600.000	100%	9.555.977.300		
			1 2 0 0 2 3	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	-	1 Gedung	2.000.000.000	1 Paket	195.000.000								2 Paket	2.195.000.000	Sekretariat BPKAD
1 2 0 0 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	6 Unit Mobil	3 Unit Motor	80.000.000	1 Unit Motor	30.000.000	2 Unit Motor	200.000.000	1 Unit Mobil	200.000.000	1 Unit Mobil	200.000.000	6 Unit Motor 2 Unit Mobil	710.000.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat			
1 2 0 0 2 6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas	-	2 Unit	24.000.000	-		2 Unit	25.200.000						4 Unit	49.200.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1200027	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	AC 5 Unit	AC 3 Unit	30.750.000	AC 2 Unit	36.000.000	AC 3 Unit	30.000.000	5 Unit	33.825.000			13 Unit	130.575.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1200028	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan Dinas	-	2 Unit	10.000.000	-		2 Unit	20.000.000	2 Unit	22.000.000	1 Unit	35.000.000	7 Unit	87.000.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1200029	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Komputer/pc 4 Unit	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	336.230.300	Komputer/Pc 12 Unit	296.000.000	Komputer/Pc 10 Unit	250.000.000	Komputer/Pc 12 Unit	275.000.000	Komputer/Pc 10 Unit	302.500.000	Komputer/Pc /Lectop 57 Unit	1.459.730.300	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
						Notebook 3 Unit	Mesin Ketik 1 Unit		Lectop 2 Unit		Lectop 4 Unit		Printer 5 Unit		Printer 5 Unit		Mesin Ketik 2 Unit			
						CPU 1 Unit	Mesin Absensi 1 Unit		Mesin Absensi 1 Unit		Mesin Absensi 1 Unit		Mesin Absensi 5 Uni							
						Dispenser 1 Unit	Printer 5 Unit		Printer 11 Unit		Printer 7 Unit		Printer 11 Unit		Printer 41 Unit					
						Kamera 1 Unit	UPS 3 Unit		Penghancur 1 Unit		Penghancur 1 Unit		Scanner 1 Unit		UPS 9 Unit					
						Printer 5 Unit	Kulkas 2 Unit						UPS 3 Unit		Kulkas 2 Unit					
							Kamera 1 Unit		TV 1 Unit						Kamera 1 Unit					
							Proyektor 1 Unit		Scaner 1 Unit						Proyektor 2 Unit					
				GPS Pengukur Tanah 1 Unit	Proyektor 1 Unit			GPS Pengukur Tanah 1 Unit												
			1200010	Pengadaan Mebelur	Jumlah Kebutuhan Mebelur	1 Set Sofa Jati plus Almari	7 Unit	331.000.000	37 Unit	120.250.000	100 Unit	60.000.000	15 Unit	66.000.000	15 Unit	72.600.000	174 Unit	649.850.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
1200020	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabtan	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	-				1 Paket	37.500.000	2 Paket	67.500.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat					
1200022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	7 Paket	4 Paket	155.500.000	3 Paket	380.000.000	3 Paket	250.000.000	3 Paket	251.000.000	4 Paket	255.000.000	17 Paket	1.291.500.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat			
1200024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	Mobil 5 Unit	Mobil 40 kali	325.000.000	Mobil 40 kali	360.000.000	Mobil 40 kali	357.000.000	Mobil 40 kali	359.000.000	Mobil 40 kali	360.000.000	Mobil 200 kali	1.761.000.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat			
			32 Motor Dinas	Motor 33 kali		Motor 33 kali		Motor 33 kali		Motor 33 kali		Motor 165 kali								
1200028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	35 Unit	200 Kali	221.100.000	200 Kali	225.522.000	200 Kali	233.000.000	200 Kali	235.000.000	200 Kali	240.000.000	1000 Kali	1.154.622.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat			
120005	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran ASN	90%	100%	30.000.000	100%	30.600.000	100%	40.000.000	100%	35.000.000			100%	135.600.000					

Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 2 0 0 0 5 3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah baju seragam	110 Set	110 Set	30.000.000	110 Set	30.600.000	110 Set	40.000.000	110 Set	35.000.000			440 Set	135.600.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	100%	100%	322.500.000	100%	350.000.000	100%	333.500.000	100%	399.270.000	100%	405.500.000	100%	1.810.770.000		
			1 2 0 0 0 5 2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim	-	1 ASN	32.500.000	2 ASN	65.000.000			2 ASN	65.000.000	2 ASN	65.000.000	7 ASN	227.500.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 0 5 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	12 ASN	12 ASN	40.000.000	12 ASN	50.000.000	12 ASN	45.000.000	12 ASN	40.000.000	12 ASN	44.000.000	60 ASN	219.000.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 3 0 5 2	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding	45 ASN	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	250.000.000	2 Kegiatan	255.000.000	2 Kegiatan	257.000.000	10 Kegiatan	1.162.000.000	Sekretariat BPKAD	Luar Provinsi
			1 2 0 2 0 5 6	Sosialisasi Pajak	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pajak	75 Peserta	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	38.500.000	1 Kegiatan	39.270.000	1 Kegiatan	39.500.000	5 Kegiatan	202.270.000	Bidang Perbendaharaan	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 6	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	90%	100%	399.179.300	100%	361.443.800	100%	390.838.400	100%	429.922.240	100%	431.500.000	100%	2.012.883.740		
			1 2 0 0 0 6 1	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	5 Dokumen	88.095.050	7 Dokumen	92.499.800,00	7 Dokumen	95.000.000	5 Dokumen	104.500.000	5 Dokumen	105.000.000	29 Dokumen	485.094.850	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 0 6 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan	45 Eksampler	3 Laporan	44.280.000	3 Laporan	61.494.000,00	3 Laporan	67.643.400	3 Laporan	74.407.740	3 Laporan	75.000.000	15 Laporan	322.825.140	Bidang Akuntansi BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 0 6 5	Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi	Jumlah Desa RTS	20 Desa	20 Desa	51.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Desa	51.000.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 1 0 6 2	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat SPJ SKPD Pertanggung Jawaban	Jumlah Verifikasi SPJ SKPD	66 SKPD	792 Kali	95.000.000	792 Kali	99.750.000,00	792 Kali	109.725.000	792 Kali	120.697.500	792 Kali	121.000.000	3.960 Kali	546.172.500	Bidang Akuntansi BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 1 0 6 4	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan SISMON Tepra Berbasis Online SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120.804.250	24 Laporan	107.700.000,00	12 Laporan	118.470.000	12 Laporan	130.317.000	12 Laporan	130.500.000	60 Laporan	607.791.250	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat

Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat (91/Sangat Baik)			1 2 0 0 8	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	90%	100%	170.000.000	100%	165.400.000	100%	170.900.000	100%	172.818.000	100%	174.000.000	100%	853.118.000		
			1 2 0 0 8 1	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	71.400.000	6 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	76.500.000	5 Dokumen	77.000.000	27 Dokumen	369.900.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 8 2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Informasi yang diupload	15 Berita	20 Berita	25.000.000	25 berita	19.000.000	25 berita	20.900.000	25 berita	21.318.000	25 berita	22.000.000	120 Berita	108.218.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 8 3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran		1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	5 Kegiatan	375.000.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 0 0 7	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	97,30%	98%	275.880.100	99%	295.500.000	100%	325.050.000	100%	330.000.000	100%	350.000.000	100%	1.576.430.100		
			1 2 0 0 7 3	Peningkatan pelaksanaan dana kas daerah oleh BUD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	7450 SP2D	7450 SP2D	275.880.100	7500 SP2D	295.500.000	7500 SP2D	325.050.000	7500 SP2D	330.000.000	7500 SP2D	350.000.000	37.450 SP2D	1.576.430.100	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat



Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan komesif	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD (WTP)	1207	1207	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketetapan Waktu Penetapan APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	5.790.019.350	Tepat Waktu	6.453.963.000	Tepat Waktu	7.099.359.000	Tepat Waktu	7.809.295.000	Tepat Waktu	8.590.224.500	Tepat Waktu	35.742.860.850		
					Persentase Belanja Langsung terhadap APBD	38,43%	36,98%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%			
					Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD	61,57%	63,02%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%			
					Persentase Belanja Modal terhadap APBD	11,75%	30%		30%		30%		30%		30%		30%			
					Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15,53%	15,61%		15,68%		15,76%		15,84%		15,92%		15,92%			
					Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD	21,63%	21,74%		21,85%		21,96%		22,07%		22,18%		22,18%			
					Persentase SILPA terhadap total APBD	4,23%	3,15%		2,76%		2,41%		2,10%		1,97%		1,97%			
					Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	86,67%	90,13%		93,74%		97,49%		100%		100%		100%			
					Persentase Penyaluran Belanja Daerah	95%	96,85		97,24		97,59		97,90		98,03		98,03			
					Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	72,73%	77,27%		81,82%		86,36%		90,91%		100%		100%			
					Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan	29,61%	29,69%		29,78%		29,86%		29,94%		30,10%		30,10%			

Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 2 1 0 7 1	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja				1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	130.050.000	2 Dokumen	132.500.000	6 Dokumen	517.550.000	BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	2 Dokumen	2 Dokumen	125.102.500	2 Dokumen	135.000.000	2 Dokumen	140.400.000	2 Dokumen	140.454.000	2 Dokumen	143.100.000	10 Dokumen	684.056.500	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	332.575.000	2 Dokumen	325.450.000	2 Dokumen	338.468.000	2 Dokumen	338.598.180	2 Dokumen	344.977.000	10 Dokumen	1.680.068.180	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah DokumenPerda APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	286.857.100	2 Dokumen	260.000.000	2 Dokumen	270.400.000	2 Dokumen	270.504.000	2 Dokumen	275.600.000	10 Dokumen	1.363.361.100	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	208.250.000	1 Dokumen	205.000.000	1 Dokumen	213.200.000	1 Dokumen	213.282.000	1 Dokumen	217.300.000	5 Dokumen	1.057.032.000	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	198.762.500	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	218.400.000	1 Dokumen	218.484.000	1 Dokumen	222.600.000	5 Dokumen	1.068.246.500	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 0	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawab an	1 Dokumen	1 Dokumen	230.570.000	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	239.200.000	1 Dokumen	239.292.000	1 Dokumen	243.800.000	5 Dokumen	1.182.862.000	Bidang Akuntansi BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 1	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen perda APBD Penjabaran Pertanggungjawab an	1 Dokumen	1 Dokumen	174.816.000	1 Dokumen	219.800.000	1 Dokumen	228.592.000	1 Dokumen	228.679.920	1 Dokumen	232.988.000	5 Dokumen	1.084.875.920	Bidang Akuntansi BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 2	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Software	1 Kegiatan	234.634.000	1 Kegiatan	260.000.000	1 Kegiatan	270.400.000	1 Kegiatan	270.504.000	1 Kegiatan	275.600.000	5 Kegiatan	1.311.138.000	Bidang Akuntansi BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 4	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	338.321.750	9 Kegiatan	325.000.000	9 Kegiatan	338.000.000	9 Kegiatan	338.130.000	9 Kegiatan	344.500.000	44 Kegiatan	1.683.951.750	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 6	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	286.381.500	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	312.000.000	3 Laporan	312.120.000	3 Laporan	318.000.000	15 Laporan	1.528.501.500	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 0	Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	66 SKPD	132 DPA/DPPA	274.086.000	132 DPA/DPPA	275.000.000	132 DPA/DPPA	286.000.000	132 DPA/DPPA	286.110.000	132 DPA/DPPA	291.500.000	660 DPA/DPPA	1.412.696.000	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 0 7 8	Pengamanan aset daerah	Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Aset yang dimiliki	66 SKPD	4 Kegiatan	165.634.500	4 Kegiatan	176.000.000	4 Kegiatan	183.040.000	4 Kegiatan	183.110.400	4 Kegiatan	186.560.000	20 Kegiatan	894.344.900	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat

Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 2 1 3 0 7 2	Penyusunan Prioritas dan flafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	111.072.500	2 Dokumen	111.100.000	2 Dokumen	115.544.000	2 Dokumen	115.588.440	2 Dokumen	117.766.000	10 Dokumen	571.070.940	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 3 0 7 4	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA-BMD	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Monev SIMDA	1 Software	1 Kegiatan	95.430.000	1 Kegiatan	116.000.000	1 Kegiatan	120.640.000	1 Kegiatan	120.686.400	1 Kegiatan	122.960.000	5 Kegiatan	575.716.400	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 3 0 7 5	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset	2 Kegiatan	2 Kegiatan	125.716.000	2 Kegiatan	85.000.000	2 Kegiatan	88.400.000	2 Kegiatan	88.434.000	2 Kegiatan	90.100.000	10 Kegiatan	477.650.000	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 4 0 7 1	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa	Jumlah Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	71.445.000	2 Dokumen	71.650.000	2 Dokumen	74.516.000	2 Dokumen	74.544.660	2 Dokumen	75.949.000	10 Dokumen	368.104.660	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 4 0 7 2	Bimbingan Teknis Implementasi tentangPengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Bimtek/Angkatan	70 ASN	1 Kegiatan	73.460.000	1 Kegiatan	87.000.000	1 Kegiatan	90.480.000	1 Kegiatan	90.514.800	1 Kegiatan	92.220.000	5 Kegiatan	433.674.800	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 4 0 7 3	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Faktur Pajak	820 Faktur	820 Faktur	101.572.750	820 Faktur	124.000.000	820 Faktur	128.960.000	820 Faktur	129.009.600	820 Faktur	131.440.000	4.100 Faktur	614.982.350	Bidang Perbendaharaan BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 4 0 7 7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang di Nilai	1 Laporan	1 Laporan	117.889.000	1 Laporan	135.000.000	1 Laporan	140.400.000	1 Laporan	140.454.000	1 Laporan	143.100.000	5 Laporan	676.843.000	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 5 0 7 0	Penigkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan,Pemeliharaan dan pengembangan sistem penyusunan anggaran	66 SKPD	4 Kegiatan	405.390.000	4 Kegiatan	285.000.000	4 Kegiatan	296.400.000	4 Kegiatan	296.514.0000	4 Kegiatan	302.100.000	20 Kegiatan	1.585.404.000	Bidang Anggaran BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 5 0 7 2	Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	12 Kali	12 Kali	51.800.000	12 Kali	22.000.000	12 Kali	22.880.000	12 Kali	22.888.800	12 Kali	23.320.000	60 Kali	142.888.800	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1 2 1 6 0 7 4	Pengelolaan sistem dan vertifikasi surat perintah membayar	Jumlah SPM yang diterbitkan	7000 SPM	7000 SPM	277.475.750	7000 SPM	300.000.000	7000 SPM	312.000.000	7000 SPM	312.120.000	7000 SPM	318.000.000	35000 SPM	1.519.595.750	Bidang Perbendaharaan	Kec.T Riattang Barat
1 2 1 6 0 7 5	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	269.000.000	16 Laporan	280.000.000	12 Laporan	291.200.000	16 Laporan	291.312.000	16 Laporan	296.800.000	72 Laporan	1.428.312.000	Bidang Perbendaharaan	Kec.T Riattang Barat			

Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kierja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1216076	Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	66 SKPD	4 Kegiatan	371.034.000	4 Kegiatan	372.000.000	4 Kegiatan	386.880.000	4 Kegiatan	387.028.800	4 Kegiatan	394.320.000	20 Kegiatan	1.911.262.800	Bidang Perbendaharaan	Kec.T Riattang Barat
			1216077	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaa APBD	792 Laporan	792 Laporan	196.645.000	792 Laporan	200.000.000	792 Laporan	208.000.000	792 Laporan	208.080.000	792 Laporan	212.000.000	3.960 Laporan	1.024.725.000	Bidang Akuntansi BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1216078	Pelaporan Aset	Jumlah Laporan Aset	2 Laporan	2 Laporan	133.239.000	2 Laporan	135.000.000	2 Laporan	140.400.000	2 Laporan	140.454.000	2 Laporan	143.100.000	10 Laporan	692.193.000	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1216076	Pengelolaan Gaji	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dalam setahun anggaran	9372 PNS	112.464 PNS	314.155.000	112.464 PNS	265.000.000	112.464 PNS	275.600.000	112.464 PNS	275.706.000	112.464 PNS	280.900.000	562.320 PNS	1.411.361.000	Bidang Perbendaharaan BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1216075	Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	15 HGB	15 HGB	218.704.500	15 HGB	160.000.000	15 HGB	166.400.000	15 HGB	166.464.000	15 HGB	169.600.000	75 HGB	881.168.500	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1216076	Penyusunan Ramperda dan Ranperkada terkait pengelolaan keuangan	Jumlah Perda dan Perkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110.820.000	1 Dokumen	147.136.000	1 Dokumen	115.297.000	1 Dokumen	124.603.000	5 Dokumen	746.500.000	Bidang Aset BPKAD	Kec.T Riattang Barat
			1220000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut temuan Kerugian Negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	95%	96%	182.500.000	97%	191.200.000	98%	210.320.000	99%	231.352.000	100%	254.487.000	100%	1.069.859.000		
			1220009	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Jumlah Kasus TGR	10 Kasus	10 Kasus	182.500.000	12 Kasus	186.150.000	12 Kasus	189.873.000	12 Kasus	193.670.000	13 Kasus	197.544.000	59 Kasus	949.737.000	Sekretariat BPKAD	Kec.T Riattang Barat
TOTAL PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN							39.000.000.000		37.300.259.800		37.978.657.400		38.163.329.600		38.361.244.360		190.803.491.160			

Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sasaran RPJMD Kabupaten Bone yang menjadi acuan pelaksanaan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yaitu *Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Mencegah terjadinya praktek KKN* yang melekat pada misi ke-1 RPJMD yaitu *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*. Indikator kinerja yang diidentifikasi adalah indikator sasaran OPD yang memiliki korelasi langsung dengan RPJMD. Indikator sasaran OPD yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Periode 2018-2023. Adapun IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PRIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	BB	A	A	A
3	Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat	75	77 (Baik)	80 (Baik)	83 (Baik)	89 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)
4	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD	38,43%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
6	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD	61,57%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
7	Persentase Belanja Modal terhadap total APBD	11,75%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
8	Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	15,53%	15,61%	15,68%	15,76%	15,84%	15,92%	15,92%

NO	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PRIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD	21,63%	21,74%	21,85%	21,96%	22,07%	22,18%	22,18%
10	Persentase SILPA terhadap total APBD	4,23%	3,15%	2,76%	2,41%	2,10%	1,97%	1,97%
11	Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	86,67%	90,13%	93,74%	97,49%	100%	100%	100%
12	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	95%	96,85%	97,24%	97,59%	97,90%	98,03%	98,03%
13	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	72,73%	77,27%	81,82%	86,36%	90,91%	100%	100%
14	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan	29,61%	29,69%	29,78%	29,86%	29,94%	30,10%	30,10%
15	Persentase tindaklanjut temuan kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP-TGR	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
16	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari	97,30%	98%	99%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	97%	98%	99%	100%	100%	100%
18	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang kondisi baik	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%
19	Persentase Kehadiran ASN	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat BPKAD 2018

## BAB VIII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Renstra BPKAD Kabupaten Bone yang merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bone untuk 5 (lima) tahun ke depan disusun dalam rangka untuk menajamkan Visi dan Misi Kepala Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.

Tujuan *mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik* dan sasaran *membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan* dengan indikator *Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* dalam RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023 menjadi patokan dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, satrategi, progran dan kegiatan yang termuat dalam Renstra BPKAD Kabupaten Bone tahun 2018-2023. Renstra BPKAD Kabupaten Bone harus mampu mencapai target indikator sasaran tersebut.

Pengalaman lima tahun lalu telah memberikan banyak pembelajaran, BPKAD Kabupaten Bone telah melakukan peran yang cukup signifikan dalam meletakkan dasar-dasar pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Kedepan sejumlah tantangan dan pekerjaan yang besar menunggu untuk dituntaskan yang memerlukan inovasi dan revitalisasi strategis dan program agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.